

SKRIPSI

**REZIM POLITIK PEMERINTAH DESA
(STUDI KASUS DESA ASSORAJANG
KECAMATAN TANASITOLLO KABUPATEN WAJO)**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana

Pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disusun oleh:

ANDI ARIYANTO RAJEMAN

E041181328

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**REZIM POLITIK PEMERINTAH DESA
(STUDI KASUS DESA ASSORAJANG
KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO)**

Disusun dan diajukan oleh:

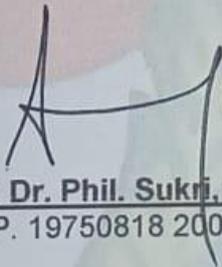
Andi Ariyanto Rajeman

E041181328

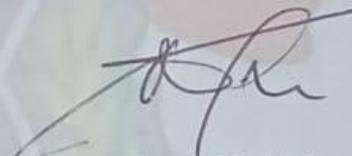
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



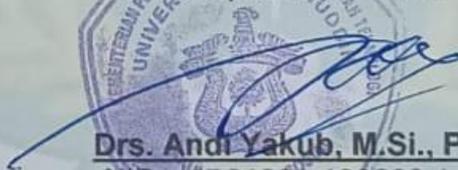
Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 19750818 200801 1 008



Haryanto, S.IP, M.A.
NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Ariyanto Rajeman
NIM : E041181328
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Rezim Politik Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Agustus 2023



(Andi Ariyanto Rajeman)

ABSTRAK

Andi Ariyanto Rajeman E041181328. Rezim Politik Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo). Di bawah bimbingan Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si. dan Haryanto S.IP., M.A.

Rezim Politik Pemerintah Desa sebagai kompleksitas dari institusi, aktor, sumber daya, dan strategi politik yang digunakan mereka para pelaku politik lokal, perumusan kebijakan, dan pemerintahan daerah. Dari pemahaman definisi tentang rezim politik lokal tersebut berhubungan dengan bagaimana tata kelola sumber daya publik dalam suatu tatanan politik, melibatkan berbagai aktor dan institusi. Pentingnya melihat institusi/ kelompok informal yang relatif stabil dengan akses terhadap sumber daya kelembagaan sehingga memungkinkannya memiliki peran berkelanjutan dalam memengaruhi pengelolaan urusan-urusan publik atau keputusan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik rezim politik lokal dan bentuk hubungan dalam rezim politik pemerintah desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa informan yang di anggap dapat memberikan informasi yang tepat dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rezim politik pemerintah desa dengan dimensi rezim yang tergambaran berdasarkan empat dimensi pemetaan aktor dan institusi, melihat relasi antar institusi, serta memahami ruang dan waktu terciptanya rezim. Hubungan dalam rezim yang ada antar pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai segitiga akomodasi. Bentuk hubungan yang ada dalam rezim politik pemerintah desa secara vertikal antara pemerintah daerah dan masyarakat serta hubungan secara horizontal antara pemerintahan desa.

Kata Kunci : Rezim Politik, Pemerintah Desa, Aktor, Institusi, Hubungan

ABSTRACT

Andi Ariyanto Rajeman E041181328. Political Regime of the Village Government (Case Study of Assorajang Village, Tanasitolo District, Wajo Regency). Guided by Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si. dan Haryanto S.IP., M.A.

Political Regime of the Village Government as the complexity of institutions, actors, resources, and political strategies that are used by local political actors, policy formulation, and regional government. From understanding the definition of local political regimes related to how the management of public resources in a political order, involves various actors and institutions. It is important to see relatively stable informal institutions/groups with access to institutional resources so as to enable them to have an ongoing role in influencing the management of public affairs or government decisions.

This study aims to identify and explain the characteristics of the local political regime and the forms of relations within the political regime of the village government. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. Data collection was carried out by interviewing several informants who were considered able to provide appropriate information using two types of data, namely primary data and secondary data.

The results of this study indicate that the political regime of the village government with the dimensions of the regime is described based on the four dimensions of mapping actors and institutions, looking at the relations between institutions, and understanding the space and time of the creation of the regime. The relationship in the regime that exists between the village government, the community, and the local government as an accommodation triangle. The form of the relationship that exists in the political regime of the village government is vertically between the local government and the community and horizontally between the village government.

Keywords: Political Regime, Village Government, Actors, Institutions, Relations

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Rezim Politik Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo”**. Shalawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mulia, yang menjadi suri tauladan dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat sebagai mahasiswa sarjana (S1), untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan, namun berkat segala bantuan dan doa dari semua pihak yang menyertai perjalanan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dalam pendahuluan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Skripsi ini penulis persembahkan kepada dua mukjizat yang tuhan kirimkan kepada penulis yaitu kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibu yang senantiasa

menjadi penyemangat bagi penulis. Bapak dan ibuku tersayang, sungguh doa kalianlah yang menginspirasi penulis untuk terus berkarya dan melangkah hingga sejauh ini. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan Bapak Haryanto, S.IP, M.A. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.

4. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus S.IP, M.Si, Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Bapak Zuhajar, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati, S.IP, M.Si**, yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Seluruh **Staf Akademik Departemen Ilmu Politik** yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Kepada keluarga besar **Himapol Fisip Unhas** yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
7. Kepada teman-teman **Ilmu Politik Angkatan 2018** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
8. Kepada saudara saudariku **Revolusi18**, Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.

9. Kepada teman-teman **KKN SOPPENG 2.2** terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, waktu, kenangan selama KKN dan telah berbagi pengalaman dan ilmu.
10. Kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini dan tetap menjalani kehidupan dengan rasa syukur serta ikhlas.
11. Untuk semua informan, terima kasih atas segala waktu yang diluangkan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.

Akhirnya penulis menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan perhatian, dukungan, bimbingan dan kerjasamanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 22 Agustus 2023

Andi Ariyanto Rajeman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Rezim Politik Lokal	15
2.3. Kerangka Berpikir	27
2.4. Skema Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Lokasi Penelitian	29
3.2. Tipe dan Jenis Penelitian.....	29
3.3. Jenis dan Sumber Data	31

3.4. Teknik Pengumpulan Data	32
3.5. Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM	36
4.1. Sejarah Desa.....	37
4.2. Profil Kepala Desa.....	39
4.3. Demografi.....	41
4.4. Kondisi Sosial Ekonomi	42
4.5. Kondisi Pemerintahan	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
5.1. Rezim Politik Lokal pada Desa Assorajang	47
5.2. Bentuk Hubungan dalam Rezim Politik Pemerintah Desa.....	64
BAB VI PENUTUP	72
6.1. Kesimpulan.....	72
6.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Desa Assorajang

Gambar 4.2. Andi Samanrukka

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Institusi Informal dalam Relasinya dengan Institusi Formal

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian

Tabel 4.1. Sejarah Desa Assorajang

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk

Tabel 4.3. Daftar Perangkat Desa Assorajang

Tabel 4.4. Daftar Anggota BPD Assorajang

Tabel 5.1. Aktor dan Institusi dalam Desa Assorajang

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1 : Kepala Desa Assorajang (Andi Samanrukka, S.IP)

Dokumentasi 2 : Ketua BPD Assorajang (Rudi Jufri, S.H)

Dokumentasi 3 : Perangkat Desa (Muh. Asrul)

Dokumentasi 4 : Kasi Tata Pemerintahan Umum – Kec.Tanasitolo (Idham Ibrahim, S.Sos., M.Si.)

Dokumentasi 5 : Tokoh Agama (Muh.Yusuf)

Dokumentasi 6 : Tokoh Nelayan (Nurdin)

Dokumentasi 7 : Tokoh Petani (Ambo Intang)

Dokumentasi 8 : Tokoh Pemuda (Amiruddin)

Dokumentasi 9 : Masyarakat (Ridwan dan Abdul Basir)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang rezim politik lokal terkait dengan usaha kepala desa memperkuat basis sosial politik di masyarakat untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Persoalan utama yang diteliti adalah membahas upaya kepala desa dengan kekuatan politiknya dalam membentuk, mengembangkan serta mempertahankan kekuasaan di rezim politik. Untuk memahami sebuah proses dari fenomena tersebut penelitian ini menggunakan konsep rezim lokal di Indonesia. Asumsi dasar dalam rezim lokal sebagaimana aktor dan institusi membahas posisi dari seorang aktor formal atau tokoh yang bergerak dalam menggunakan serta bergantung pada sumber daya dan broker milik negara. Kemudian perspektif dari rezim politik pemerintah desa dengan membawa asumsi peranan aktor formal membahas analisis fenomena ini dengan kerangka alternatif dari karakteristik rezim serta menjelaskan hubungan yang terjalin pada ruang lingkup pemerintah desa, masyarakat desa serta pemerintahan daerah.

Sejak pergeseran desentralisasi bergulir telah terjadi kebangkitan politik lokal. Baru-baru ini proses desentralisasi di Indonesia disamakan dengan proses demokratisasi dan kebangkitan masyarakat sipil. Tetapi ini merupakan beberapa proses yang dianggap berlainan. Pergeseran pemerintahan juga tidak secara otomatis mengisyaratkan pergeseran dari negara yang kuat ke negara masyarakat sipil yang kuat. Melemahnya

negara pusat tidak secara otomatis membuahkan demokrasi tingkat lokal lebih kuat. Sebaliknya, desentralisasi di bawah kondisi-kondisi tertentu bisa dibarengi dengan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter.¹ Kehadiran demokrasi pada ranah lokal didasarkan pada keyakinan bahwa lokal merupakan arena baru untuk masyarakat (dan juga elit) belajar berpolitik dan berdemokrasi. Menghubungkan antara demokrasi dan rezim lokal telah mengembangkan berbagai konsep alternatif dalam kajian politik lokal.

Beberapa studi tentang rezim politik lokal khususnya dinamika dari rezim politik di ranah lokal tingkat kabupaten menjelaskan bahwa rezim politik lokal dapat terbentuk karena adanya aktor-aktor lokal di daerah dan dapat bekerja karena ada kekuasaan yang dimiliki. Aktor dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dalam birokrasi, aktor-aktor itu pun terdiri dari aktor formal dan aktor informal. Kekuasaan dalam ruang tertutup seringkali dijadikan ruang terbentuknya kesepakatan antar aktor formal dan aktor informal. Hal ini dipengaruhi karena adanya kesepakatan berupa jual beli jabatan, politik balas budi atau hubungan patron klien. (Aninditya Normalitasari dan Laila Kholid A, 2020)

Berbagai studi lain juga menjelaskan terkait rezim politik lokal yang menjelaskan terkait pentingnya relasi antar elit, sub-elit dan masyarakat dalam mempertahankan dinasti keluarga yang telah menjadi rezim kepala desa. Tidak hanya dengan memanfaatkan relasi yang telah terjalin antara elit dan sub-elit juga memanfaatkan pengaruh budaya dalam masyarakat

¹ Henk Schulte Nordholt dkk, Politik Lokal di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007) hlm. 2

untuk mendapatkan legitimasi serta mobilisasi masyarakat. Keikutsertaan berbagai elit dari berbagai sisi mulai elit ekonomi, elit politik, dan elit sosial menjadikan rezim kepala desa dan dinasti keluarga dapat tetap bertahan hingga saat ini. (Ruth Agnesia Sembiring dan Mishbahul Khoiri, 2021)

Dalam beberapa studi juga menyebutkan istilah orang kuat lokal pertama kali diperkenalkan oleh Joel S. Migdal dalam bukunya. Migdal berusaha menjelaskan mengapa orang kuat lokal, melalui keberhasilan mereka di kontrol sosial, sering kali secara efektif menangkap bagian dari negara-negara. Mereka telah berhasil menempatkan diri mereka sendiri atau anggota keluarga mereka di pos-pos negara yang kritis untuk memastikan alokasi sumber daya menurut aturan mereka sendiri, bukan aturan yang dikemukakan dalam retorika resmi, pernyataan kebijakan, dan undang-undang yang dibuat di pemerintah pusat atau yang diajukan oleh pelaksanaan pemerintah ranah lokal.

Menurut Migdal dalam Danil Akbar (2020:207), orang kuat lokal hadir akibat lemah kekuatan Negara untuk memonopoli kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Dengan asumsi Negara atau dikenal dengan kata Pemerintah sebagai sebuah organisasi terbesar dalam suatu Negara berdampingan dengan organisasi lainnya baik itu berbentuk formal atau informal. Khusus bagi Informal, kemampuan individu ini mampu mengurangi legitimasi Negara sebagai kontrol sosial yang sah. Local strongman menampilkan personalisasi dan klientelisme dalam hubungan patronase politik baik kepada negara maupun masyarakat.

Desentralisasi yang tujuannya untuk pengembangan daerah secara

mandiri justru lebih didominasi oleh pertarungan aktor-aktor politik. Monopoli kekuasaan di daerah-daerah tertentu juga menambah catatan hitam desentralisasi di Indonesia. Akibatnya desentralisasi justru menjadi identik dengan oligarki pada tatanan lokal. Selain itu, adanya desentralisasi oleh para elit politik tingkat lokal justru menjadi persoalan baru.² Desentralisasi di Indonesia justru memunculkan elit lokal yang dengan kekuatan politik maupun kekuatannya melakukan manipulasi terhadap pemilu elektoral, melakukan korupsi dan politik uang.

Sebagai dampak dari tumbuhnya politik baru di Indonesia, lanskap politik di ranah lokal turut berubah. Otonomi daerah, pemekaran, dan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) adalah sebagian wujudnya. Namun demikian, tidak semua kemunculan politik baru menghadirkan kebaikan bersama. Para elit baik yang duduk di kursi eksekutif maupun di legislatif, sama-sama memanfaatkan kas daerah untuk mempertahankan klien (bawahan) atau kroni mereka. Dengan cara memanipulasi badan pembuat kebijakan di ranah lokal para elit mengarahkan aparatur pemerintah untuk menghasilkan keputusan politik yang menguntungkan dirinya dan kroninya. Dampaknya tidak sedikit aktor atau elit informal yang kemudian menjadi aktor atau tokoh formal.

Berdasarkan uraian diatas pembahasan mengenai rezim politik lokal yang merupakan isi dari tulisan ini adalah suatu kajian politik yang dipilih berdasarkan fenomena yang terjadi dalam dinamika politik Kabupaten Wajo terkhusus ranah lokal. Dari 14 kecamatan yang terdapat di

² Abdul Chalik, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 9.

Kabupaten Wajo, Kecamatan Tanasitolo menjadi bagian yang dilihat dalam fokus tulisan ini. Kemudian Kecamatan Tanasitolo terbagi dari 4 kelurahan yakni Baru Tancung, Mappadaelo, Pincengpute, Tancung dan 15 desa yakni Assorajang, Inalipue, Lowa, Mannagae, Mario, Nepo, Pajalele, Pakkana, Pallipu, Tonralipie, Ujung Baru, Ujunge, Wae Tuwo, Wajoriaja, dan Wewangrewu. Seperti yang telah terjadi pada Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Secara sosial, Desa Assorajang menjadi desa dengan penduduk terbanyak dibandingkan dengan 15 desa yang terdapat di Kecamatan Tanasitolo. Sebagai desa dengan penduduk terbanyak histori kepemimpinan Desa Assorajang terbilang berbeda sebab telah dipimpin oleh Andi Bakti selama beberapa periode. Setelah periode Andi Bakti berakhir kemudian Andi Samanrukka mencalonkan sebagai kepala desa untuk melanjutkan kekuasaan Andi Bakti dimana sebelum kekuasaan Andi Bakti yang merupakan saudara kandungnya, Desa Assorajang pernah dipimpin oleh Andi Sade yang merupakan bapak dari Andi Bakti dan Andi Samanrukka.

Pada pemilihan kepala desa tahun 2008 dimenangkan oleh Andi Samanrukka, mengalahkan 4 calon kepala desa yang ikut pada pemilihan kepala desa yaitu H. Andi Mattola, Irwan Arifin, Adna, dan Syamsul Bahri. Kemudian pada Pemilihan Kepala Desa Assorajang selanjutnya, Andi Samanrukka sebagai petahana periode kedua pada tahun 2015 sekaligus adik kandung dari Kepala Desa Assorajang sebelumnya pada Pemilihan Kepala Desa Assorajang Tahun 2015 memperoleh suara sebanyak 1.513 dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 3.084 yang jika dibandingkan

dengan lawannya Muhammad Adry hanya mendapat 256 suara. Kemudian pada periode ketiganya pada tahun 2021 di Pemilihan Kepala Desa 2021, Andi Samanrukka memperoleh suara sebanyak 1.285 dari jumlah pemilih 3.036 yang jika dibandingkan dengan ketiga lawan lainnya yaitu Andi Agus sebanyak 560 suara, Supardi sebanyak 137 suara, dan Fahmi sebanyak 76 suara.

Dalam perkembangan munculnya aktor kuat dalam arena politik skala paling bawah dalam negara yakni desa menjadikannya sebuah rezim politik lokal yang dapat bertahan. Pilkades sendiri bisa menjadi panggung bagi para individu atau aktor dapat memperoleh posisinya sebagai aktor formal. Menjadi kepala desa merupakan keuntungan bagi individu atau aktor sebab dengan berbagai sumber daya yang dimiliki dalam ranah lokal di desa, Individu atau aktor ini dapat mempertahankan kekuasaan serta melanggengkan jabatannya. Menurut Sidel dalam tulisannya di tiga negara asia tenggara, kontrol atas kantor kepala desa menjamin akses istimewa ke sumber daya negara dan kebijaksanaan atas kekuasaan pengaturan negara dalam perekonomian.³ Berdasarkan uraian di atas, asumsi terhadap Andi Samanruka sebagai kepala desa telah berjalan selama tiga periode telah menjadikannya sebagai aktor dalam rezim politik lokal yang memenangkan tiga kali konstelasi politik di Pemilihan kepala desa melanjutkan kepemimpinan dari keluarga sebelumnya.

Kemenangan Andi Samanruka beberapa kali berturut-turut dalam kontestasi politik Desa Assorajang tidak lepas dari posisinya sebagai aktor

³ John T. Sidel, Op. cit, hlm. 62.

atau elit lokal dilingkup masyarakat berjejaring yang masih kental akan karakteristik suku bugis dalam bermasyarakat. Kemenangannya di Desa Assorajang tidak lepas dari keberhasilan memanfaatkan posisinya yang memiliki modal sosial atau menggunakan posisinya sebagai aktor untuk memanfaatkan sumber daya negara dan broker pemerintahan yang dimiliki. Dimana Andi Samanruka sebagai Kepala Desa Assorajang sekaligus sosok aktor formal utama selama ini telah mengembangkan serta mempertahankan kekuasaannya dengan basis kekuatan sosial politik dimiliki serta mempertahankan pengaruhnya dalam masyarakat bugis. Dari kontrolnya pada modal sosial tersebut yang berusaha mempertahankan sistem birokrasi patrimonial, jaringan sosial, dan klan serta menjaga kekuatan patronase Andi Samanruka untuk tetap kuat. Oleh karena itu kekuatan politik yang bersumber dari kontrol terhadap modal yang dimiliki sebagai kepala desa memberikan kesan maksimal akan kontribusi yang diberikan bagi masyarakat desa terutama dalam pelayanan dan keadilan ditengah hidup masyarakat. Sehingga aktor mampu memperoleh kekuatan politik sosial dari hasil memonopoli kekuasaan dan memanfaatkan posisinya sebagai orang yang berpengaruh di aras lokal.

Berdasarkan penjelasan diatas, kemudian penulis melihat nampaknya terjadi proses politik yang dilakukan oleh kepala desa sebagai aktor dalam mempertahankan rezim politiknya serta pengaruhnya untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar dengan relasi dan memanfaatkan berbagai keuntungan yang dimiliki sebagai kepala desa kemudian membawanya pada kekuasaan atas rezim politik di pemerintah desa yang terus berlanjut, yang

menjadi kekuatan utama Andi Samanruka dalam mempertahankan kepemimpinan kepala desa yang telah dianggap menjadi rezim politik lokal. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Rezim Politik Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo)”**

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, serta mengingat luasnya cakupan masalah yang akan diteliti maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik rezim politik pemerintah desa di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana bentuk hubungan dalam rezim politik pada aspek pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui karakteristik rezim politik pemerintah desa pada Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui pola hubungan dalam rezim politik lokal pada aspek pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

A. Manfaat akademis

1. Dapat menjadi bahan acuan pembelajaran terhadap Dinamika Politik Lokal khususnya pada Demokrasi dan Rezim Politik Lokal yang berkaitan dengan elit atau aktor formal.
2. Merangsang munculnya penelitian baru dalam bidang ini sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan.
3. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan secara khususnya dalam politik kontemporer.

B. Manfaat praktis

1. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas studi ilmu politik, khususnya demokrasi dan rezim lokal.
2. Sebagai bahan referensi bacaan keilmuan khususnya ilmu politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan tentang teori, konsep dan pendekatan yang dianggap sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga penulis dapat menganalisis masalah. Hal ini dianggap saling terkait dengan fenomena yang diangkat dalam penulisan ini, sekaligus menjadi landasan atau kerangka pemikiran dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2.1. Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)

Dalam penelitian Aninditya Normalitasari⁴ dengan judul Hegemoni Rezim Politik Di Ranah Lokal: Studi Kasus Di Kabupaten Pati Di Bawah Kepemimpinan Haryanto memberi gambaran terhadap rezim politik lokal terbentuk atas peran aktor lokal dalam Pilkada dan menjelaskan proses hegemoni dari rezim politik lokal terbentuk. Dalam tulisan ini peneliti menggunakan dua teori yaitu teori *Power Cube* (Kubus Kekuasaan) dan Kepemimpinan untuk menganalisis dua rumusan permasalahan utama dalam penelitian.

Selain peran figure kandidat, peran dukungan politik dan ekonomi serta aktor-aktor sosial politik juga merupakan hal yang penting. Pilkada selalu ditandai dengan adanya peran elit lokal. Elit lokal mempunyai power (kekuasaan) untuk melakukan suatu tindakan. Elit dan kekuasaan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Pilkada di Pati diikuti oleh kandidat yang memiliki popularitas yang tinggi di

⁴ Aninditya Normalitasari. Hegemoni Rezim Politik di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Pati di Bawah Kepemimpinan Haryanto. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020), hlm. 10.

masyarakat. Kandidat yang memiliki popularitas yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat dukungan masyarakat. Selain faktor popularitas dan figure, dukungan politik yang dimiliki pun kuat. Banyak partai politik yang merapat ke kandidat. Aktor-aktor sosial politik yang ada juga cukup membantu untuk memperebutkan kekuasaan. Aktor yang terlibat merupakan orang-orang terpilih yang dianggap mampu memberi pengaruh dalam lapisan masyarakat.

Pilkada di Pati pada tahun 2017 hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja, dan harus berlawanan dengan kotak kosong, namun hal tersebut membawa keuntungan bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Apalagi kandidat merupakan seorang petahana yang sudah pasti memiliki basis sumber daya politik yang baik, dan sudah dikenal oleh masyarakat. Banyak partai politik merapat untuk mendukung. Beragam sumber daya mobilisasi yang dilakukan menjelang pilkada. Mengikuti jalan pikiran teori *Power cube*, kekuasaan politik lokal terbagi ke dalam tiga bagian, yakni kekuasaan yang terlihat, tidak terlihat, dan tersembunyi. Kekuasaan yang terlihat (*visible forms of power*) terwujud dalam kekuasaan yang melembaga, yang secara langsung dapat menentukan arah kebijakan politik. Dalam konteks Pilkada, Parpol pengusung atau lembaga yang mendukung secara langsung terhadap calon Kepala Daerah dikategorikan dengan kekuasaan “yang tidak terlihat”. Strategi target dalam kekuasaan yang terlihat menyangkut “siapa, apa dan bagaimana”. Hal tersebut dijelaskan oleh John Gaventa sebagai kekuasaan dalam Ruang tertutup Ruang dimaksud adalah sebagai usaha dari pengambil kebijakan untuk mengobservasi, membangun komunikasi

hingga mengontrol kekuasaannya. Secara kasat mata, praktik politik yang demikian tidak banyak dikritisi oleh masyarakat. Bahwa di balik dukungan Parpol mayoritas atau kekuatan elite tertentu ada cost yang harus dibayar mahal oleh pemenang.

Dapat disimpulkan bahwa rezim politik lokal dapat terbentuk karena adanya aktor-aktor lokal di daerah dan dapat bekerja karena ada kekuasaan yang dimilikinya. Aktor dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dalam birokrasi, Aktor-aktor itupun terdiri dari aktor formal dan aktor informal. Aktor formalnya seperti DPR, Forkopimda dan aktor non formalnya seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kekuasaan dalam ruang tertutup seringkali dijadikan ruang terbentuknya kesepakatan antara aktor formal dan informal. Kesepakatan ini bisa berupa jual beli jabatan maupun politik balas budi yang dilakukan oleh pejabat publik kepada partai politik atau individu yang telah mendukungnya pada saat pencalonan dan munculnya kebijakan-kebijakan tertentu. Kekuasaan menjadi cenderung elitis dan hanya mewakili golongan tertentu.

Persamaan penelitian Aninditya Normalitasari dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penggunaan konsep rezim politik dalam topik pembahasan terhadap rezim politik lokal dan adanya aktor-aktor formal dan informal yang berperan dalam proses pembentukan rezim politik tersebut. Kemudian dalam perbedaan yang penulis rangkum adalah pertama, penggunaan teori yang berbeda dalam menganalisis topik pembahasan yang sama dan kedua, perspektif skala penelitian yang lebih spesifik pada bagian terkecil pemerintahan yaitu desa, dengan daerah otonominya sendiri.

Dalam penelitian Ruth Agnesia Sembiring⁵ dengan judul Relasi Elite, Sub-Elite, dan Masyarakat Desa dalam Mempertahankan Dinasti Keluarga Masra di Desa Gapurana Kabupaten Sumenep: Studi pada Rezim H. Andiwarto Tahun 2013-2019 memberi gambaran terhadap rezim politik lokal dalam pemerintahan Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Keluarga telah memerintah desa selama kurang lebih 150 tahun, lima generasi, menjadikannya sebuah dinasti Masra. Dinasti Masra dalam pemerintahan Gapurana dapat dilihat dari dua aspek: negatif dan positif. Aspek negatifnya adalah menghambat elite baru dari masyarakat. Lima generasi dinasti keluarga Masra yang panjang telah menutup kesempatan individu lain untuk memimpin desa. Meski demokrasi berkembang dengan baik di Gapurana, ada kalanya keluarga Masra tidak memiliki lawan politik. Sisi positifnya, dinasti tersebut menjadi bukti keberhasilan keluarga Masra memimpin desa, terlihat dari legitimasi yang diberikan warga desa kepada keluarga Masra. Keberhasilan H. Andiwarto dalam mempertahankan dinasti dalam pemerintahan dibuktikan dengan pemerintahan yang baik dan kedekatannya dengan elite desa. Hal itulah yang melatarbelakangi penelitian ini untuk membahas relasi antara elite (H. Andiwarto), sub-elite, rakyat jelata Gapurana, dan keberhasilan keluarga dalam kepemimpinannya di Desa Gapurana Kabupaten Sumenep Jawa Timur.

Relasi antar elite merupakan salah satu cara untuk meraih kemenangan dalam kontestasi. Persaingan yang ketat membuat para elite calon pemimpin membangun relasi dengan elite lain di masyarakat agar

⁵ Ruth Agnesia Sembiring. Relasi Elite, Sub Elite, dan Masyarakat Desa dalam Mempertahankan Dinasti Keluarga Masra di Desa Gapurana Kab. Sumenep, *Jurnal Society* (Bangka Belitung: UBB, 2021). Hlm 447.

berpeluang lebih besar untuk menang. Sebagai hubungan timbal balik antara elite dan sub-elite, menurut Keller (1998), dalam penelitian ini sub-elite merupakan jembatan antara H. Andiwarto dengan masyarakat desa. Melalui merekalah masyarakat membuat kesepakatan Bersama peran elite dalam kehidupan masyarakat desa adalah dominasi legal-rasional. Dalam legitimasi jenis ini, elite menjadi legitimasi karena kemampuannya memenuhi konvensi yang disepakati oleh masyarakat. Peran mereka dalam kehidupan sosial dan politik merupakan pemenuhan konvensi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa. Legitimasi sub-elite dan hubungannya dengan H. Andiwarto membuat pengakuan masyarakat terhadap H. Andiwarto semakin kuat.

Dapat disimpulkan bahwa relasi yang digunakan H. Andiwarto dalam melestarikan dinasti keluarga Masra di pemerintahan desa Gapurana adalah terkait dengan elite politik, elite ekonomi, dan elite sosial. Relasi elite (H. Andiwarto) dengan elite politik sangat vital dalam menentukan keberlangsungan dinasti keluarga Masra. Sebaliknya, relasi dengan elite sosial merupakan determinan pendukung.

Persamaan penelitian Ruth Agnesia Sembiring dengan penelitian yang akan peneliti adalah pertama, penggunaan konsep yang sama terhadap rezim politik lokal dan yang kedua persepsi skala penelitian ditingkat desa. Kemudian perbedaan yang peneliti rangkum berada pada penggunaan teori yang berbeda yaitu teori relasi kuasa dan teori elit untuk menganalisis rezim lokal di tingkatan desa.

2.2. Rezim Politik Lokal

Beberapa studi tentang politik lokal menggarisbawahi bahwa proses demokrasi yang berlangsung di lokal memproduksi karakter demokrasi lokal menggambarkan tiga hal. Yang pertama, ada keterlanjutan corak relasi kuasa yang bersifat patronase dalam perkembangan demokrasi. (Klinken, 2009). Demokrasi lokal justru memberi kesempatan bagi pelanggungan pola-pola patronase lama, yang disebut Nordholt dan Van Klinken sebagai *changing continuities* (2007). Yang kedua, corak demokrasi lokal jamak dimonopoli dan didominasi oleh kelompok oligarki sebagai kekuatan yang paling dominan dalam proses demokrasi lokal (Robinson & Hadiz, 2004; Priyono & Willy Purna Samadhi, 2007; Winters, 2011). Yang ketiga, kemunculan *figure-based politic* atau *local populism* (Mas'udi, 2017) dalam proses kelahiran para elite politik lokal.⁶

Proses politik dan demokratisasi yang berlangsung searah, top-down, tak dipungkiri telah memunculkan oligarki politik dan dinasti politik. Patronase malah terus berkembang menjadi alat efektif untuk memenuhi kepentingan elektoral. Dalam peta yang lebih besar, hal ini menimbulkan konsekuensi lain yang tak kalah pelik; pengendalian politik lokal oleh pusat, baik secara langsung maupun melalui orang kuat setempat (*local strongman* atau *bossism local*) (Agustino & Yusoff, 2010, hal. 23) Di sisi lain, kekuatan-kekuatan politik di tingkat pusat menggunakan *power vertical* nya untuk mengendalikan dan menguasai sumber daya daerah.⁷

⁶ Longgina Novadona Bayo dkk, *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) hlm. 12.

⁷ *Ibid.* hlm. 13.

Terkait dengan pemaknaan demokrasi, ada tiga kata kunci yang akan dioperasionalkan dalam studi untuk mendiagnosis sejauhmana kondisi demokratisasi berlangsung di tingkat lokal, yaitu isu publik, kontrol publik, dan kesetaraan politik. Artinya, derajat demokratis dan tidaknya sebuah rezim di daerah/lokal akan dilihat dari ketiga parameter kunci dalam makna demokrasi ala Beetham.

Konsep yang berpengaruh dengan dinamika politik ditingkat lokal dimana rezim politik lokal sebagai poros pembahasan. Rezim dengan pola patronase merujuk pada suatu sistem politik di mana pemerintah atau penguasa mengontrol dan mempertahankan kekuasaannya melalui pemberian imbalan, dukungan, atau fasilitas kepada kelompok-kelompok atau individu tertentu dalam masyarakat. Dalam pola patronase, loyalitas dan dukungan diberikan dalam pertukaran atas manfaat material atau posisi politik. Serta lokal populisme yang mengacu pada pendekatan politik di tingkat lokal di mana pemimpin atau kelompok politik berusaha memenangkan dukungan masyarakat dengan mengexploitasi sentiment lokal, kebutuhan, dan keinginan. Hal ini sering melibatkan janji-janji untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat lokal. Populisme lokal bisa menjadi salah satu faktor yang kuat dalam mempengaruhi politik dan kebijakan di tingkat lokal.

Sedangkan terkait rezim, banyak definisi yang diberikan dalam menjelaskan pengertian rezim. Dari berbagai makna tersebut, secara konseptual dapat disimpulkan bahwa rezim merupakan pola dasar (prinsip, nilai, norma, dan prosedur) yang terjewantahkan dalam sebuah organisasi,

praktik, dan proses pembuatan kebijakan (Higley dan Burton, 1989 dalam Case, 1994, hal 433; William case 1994, hal. 433). Oleh sebab itu rezim bukan sekadar merujuk pada aktor pemegang kekuasaan semata, melainkan juga seperangkat institusi atau aturan main yang disepakati bersama.⁸

Konsep rezim lokal dalam literatur politik, memiliki banyak definisi. Stone (Stone,1989, hal. 6) misalnya, mendefinisikan rezim lokal sebagai pengaturan informal di mana badan publik dan swasta berfungsi bersama untuk dapat membuat dan melaksanakan keputusan pemerintah. Menurut Stone, definisi ini memotret bahwa diskusi rezim adalah diskusi relasi pengaturan forma dan informal, dan rupanya Stone juga memberikan penekanan pada pentingnya melihat institusi/kelompok informal yang relatif stabil dengan akses terhadap sumber daya kelembagaan sehingga memungkinkannya memiliki peran berkelanjutan dalam memengaruhi pengelolaan urusan-urusan publik atau keputusan pemerintah.

Berbeda dengan Stone, Vladimir Gelma, dan Sergei Ryhenkov (2011) memahami rezim lokal sebagai kompleksitas dari institusi, aktor, sumber daya, dan strategi politik yang digunakan mereka para pelaku politik lokal, perumusan kebijakan, dan pemerintahan daerah. Dari pemahaman kedua definisi tentang rezim lokal tersebut, rezim lokal berhubungan dengan bagaimana tata Kelola sumber daya publik dalam suatu tatanan politik, melibatkan berbagai aktor dan institusi.⁹

Dari berbagai definisi tersebut, pemahaman tentang konsep rezim dalam riset ini meliputi beberapa hal yang membangun dimensi rezim lokal.

⁸ Ibid. hlm. 17

⁹ Longgina Novadona Bayo, Loc.Cit.

Pertama, rezim meliputi aktor dan institusi baik formal maupun informal, juga institusi formal dan informal. Dalam kajian ini, institusi mengacu pada aturan main yang mengindikasikan apa yang dapat dilakukan dan harus dilakukan oleh aktor atau sebuah kerangka peraturan yang teroganisir. Institusi juga erat kaitannya dengan sistem nilai, tradisi, norma, dan praktik menyeluruh yang membentuk atau membatasi perilaku aktor politik (North, 1990; Scott, 1995). Pengaturan institusi di tingkat lokal biasanya dipengaruhi oleh norma-norma fundamental yang berlaku di daerah tersebut (Norton, 1994). Hubungan kompleks antara institusi formal dengan budaya dan norma sosial di masyarakat yang informal membuatnya tumbuh bersama dan saling memengaruhi satu sama lain hingga membentuk sebuah karakter.

Kedua institusi tersebut, yakni institusi formal dan informal tersebut terjalin relasi di antara keduanya. Relasi yang terbentuk di antara institusi formal dan informal tidak selalu merupakan relasi yang saling menegasikan. Interaksi antara institusi formal dan institusi informal ini seringkali mengakibatkan dual polity di lokal. Studi yang dilakukan oleh Helme dan Levitsky (2004), mencoba melihat posisi institusi informal dan hubungannya dengan institusi formal. Pola relasi keduanya melahirkan empat tipologi institusi informal, yaitu: complementary informal institutions, accommodating informal institutions, competing informal institutions, substitutive informal institutions.

2.1. Tabel 1 Institusi Informal dalam relasinya dengan institusi formal

Outcome	Institusi formal efektif	Institusi formal tidak efektif
----------------	---------------------------------	---------------------------------------

Convergent (Saling mendekat)	Complementary (Melengkapi peran institusi formal)	Substitutive (Menggantikan peran institusi formal)
Divergent (Saling menjauhi)	Accommodating (Akomodatif terhadap institusi formal)	Competing (Menyaingi institusi formal)

Sedangkan aktor dalam kajian rezim lokal ini juga meliputi aktor formal dan aktor informal. Aktor formal di tingkat lokal didefinisikan sebagai aktor yang memegang kekuasaan formal, ia bisa merupakan kepala daerah, legislative, maupun partai politik (politisi). Sedangkan aktor informal adalah aktor yang memegang kekuasaan informal. Sumber kekuasaan informal ini berdasarkan ketentuan sosial kultural dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut atau berdasarkan modal sosial, modal budaya, maupun modal ekonomi yang cukup besar karena menguasai akses terhadap sumberdaya.¹⁰

Ketiga, rezim bersifat stabil. Artinya, sistem aturan main (tata Kelola kekuasaan) yang terbentuk telah melembaga, terus bertahan meskipun pemerintahan berganti. Hal ini menekankan pada aspek pengaturan informal yang stabil karena akses institusi informal yang stabil terhadap sumber daya institusi. Rezim berjalan dalam kondisi yang relatif stabil dan beroperasi tanpa hierarki formal, tidak ada arah yang fokus dan kepemilikan kontrol tunggal. Rezim memandang bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang

¹⁰ Ibid. hlm. 19.

terfragmentasi karena adanya pembagian kerja antara pasar dan negara. Rezim berdiri diatas dua asumsi yaitu asumsi pluralis yang menyatakan bahwa otoritas pemerintah cukup memadai untuk membuat dan melaksanakan kebijakan; serta asumsi strukturalis yang berasumsi bahwa dengan kekuatan ekonomi dapat menentukan berjalannya sebuah kebijakan.

Keempat, rezim lokal dipengaruhi oleh karakteristik struktural eksogen dari lokalitas, yang terdiri dari letak/posisi geografis, sumber daya alam, struktur lokal (karakter atau profil sosial ekonomi, sosial budaya masyarakat), serta konteks perkembangan yang terjadi di level nasional maupun internasional. Kelima, Rezim terbentuk karena adanya kesempatan politik, yang membentuk lingkungan politik dan kelembagaan rezim lokal, serta memberikan insentif bagi aktor-aktor yang terlibat dalam rezim. Dalam konteks ini, aspek kebijakan/tata Kelola sumber daya publik di level supra-lokal (nasional) berdampak pada tata Kelola kekuasaan di lokal. Artinya, kehadiran rezim di tingkat lokal sebagai bentuk respons lokal terhadap perubahan politik dan kelembagaan yang terjadi di tingkat lokal sebagai konsekuensi dari desain sebuah kebijakan yang dilakukan di tingkat nasional.

Pemahaman terhadap konsep rezim lokal diartikan sebagai kompleksitas bekerjanya institusi, aktor, sumber daya, dan strategi politik yang digunakan para pelaku politik lokal dan perumus kebijakan lokal dalam memengaruhi maupun merespons kebijakan yang menyangkut urusan publik (Gelma dan Ryzhenkov, 2011). Kompleksitas dari bekerjanya institusi, aktor, dan sumber daya di lokal tersebut dapat pula diekspresikan dalam tindakan-tindakan yang terkait pengelolaan urusan publik di mana yang informal

memiliki akses yang stabil terhadap sumber daya institusi sehingga dapat terlibat dan punya peran yang kontinyu dalam proses kebijakan yang menyangkut urusan publik. Masing-masing rezim lokal ini mungkin akan melahirkan karakter rezim lokal yang berbeda karena governing regime tersebut memiliki basis sumber daya yang berbeda dalam membangun dan mempertahankan kekuasaannya.

Di tingkat lokal lah terletak pusat-pusat kekuasaan yang satu sama lain saling berinteraksi, dan di tingkat lokal pula imajinasi-imajinasi genuine tentang praktik demokrasi dapat ditemukan. Alasan-alasan yang memperlihatkan bahwa ada sejumlah isu penting yang perlu diperhatikan untuk mengetahui variasi rezim lokal di berbagai konteks di Indonesia. Ada enam isu yang membentuk rezim lokal, yaitu (1) pola relasi kuasa dilokal; (2) hubungan antaraktor negara-masyarakat (resiprokalitas antar aktor); (3) eksistensi dan pengaruh informalitas dalam demokrasi lokal; (4) eksistensi dan pengaruh demos; (5) eksistensi dan pengaruh gerakan masyarakat sipil; serta (6) kapasitas pengelolaan dan distribusi sumber daya alam.

Sistem kategori yang dipakai untuk melakukan klasifikasi rezim. Titik tolak dari makna dasar rezim itu sendiri, telaah tentang rezim dilakukan dengan mencermati set-up kelembagaan di mana para aktor berkiprah untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan sendiri, ataupun mengupayakan terwujudkan kepentingan publik. Dalam mengamati bekerjanya rezim, perhatikan didedikasikan untuk mencermati nuansa relasi yang terjalin, formal atukah informal. Ada rezim yang lebih menekankan pada formalitas dan ada pula yang lebih mengedepankan informalitas. Perlu ditekankan

bahwa persoalan formalitas dan informalitas di sini adalah persoalan gradasi. Lebih dari itu, yang diperhatikan adalah pengandalannya, bukan ada-tidaknya. Hal yang sama, berlaku juga dalam menelaah aktor-aktor utama dalam perpolitikan lokal. Pada sisi manapun ada aktor-aktor kunci terlibat, dan pelibatan mereka bisa melalui domain formal maupun informal.

Di manapun politik lokal diamati di negeri ini, elite niscaya tidak tinggal diam. Elite memiliki kemampuan lebih, termasuk kemampuan membaca dan memanfaatkan kesempatan yang mengedepankan. Sungguhpun begitu, tidak di semua lokalitas derajat dominasi elite itu sama. Begitu juga set up kelembagaan politik lokal. Ada set up yang membuat dominasi tidak terkendali, dan ada pula set up yang memaksa mereka menahan diri. Selalu saja ada domain informal disamping adanya domain formal. Dalam kesadaran akan hal ini, di sejumlah lokalitas ditemukenali rezim yang formalitas-elitis. Untuk membedakan dengan peran elite di daerah-daerah lain, rezim ini ditandai oleh elitism dosis tinggi.

Elitisme semacam itu tergambar secara jelas di Kutai Kertanegara, tokoh sentral (ataupun tokoh-tokoh kunci lainnya), berpretensi bisa mengandalkan formalitas semata. Yang hendak dikatakan di sini bukanlah kenyataan, bahwa di lokalitas ini tidak ada informalitas dalam perpolitikan yang berlangsung, melainkan pretensi dalam permainan politik elite; seolah-olah pertaruhannya ada tampilan formal. Dari pengamatan di lokalitas yang masuk dalam rezim ini, ide demokrasi diterima dengan kesan bersungguh-sungguh, meskipun kalau dicermati secara seksama, yang terjadi hanyalah komitmen permukaan. Permainan formalitas yang dimainkan adalah merebut

hati (popularitas) untuk menduduki jabatan publik, dan setelah menduduki jabatan publik kunci, dirinya menghadirkan diri sebagai negara. Dalam pengertian inilah istilah formalisme elite dipakai.

Formalisme semacam yang digambarkan di atas juga sangat kental mewarnai perpolitikan di Aceh dan Lombok. Formalisme dalam berdemokrasi ini sebetulnya menjadi tempat menyembunyikan pragmatisme sang tokoh. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa peluang untuk pragmatis dalam rezim ini terbuka lebar, dan publik tidak memiliki kapasitas untuk menghentikan pragmatisme itu sendiri. Dengan diadopsinya prinsip demokrasi, rakyat jelatan bisa mengonversi diri menjadi sosok yang mengatasnamakan, kalau bukan sekadar menjalankan simbolisasi negara. Hanya saja, yang menjadi tujuan adalah menikmati kekuasaan negara.

Tokoh-tokoh dominan berkepentingan untuk hadir dalam wajah negara. Jelasnya, sebutan formalitas merujuk pada hadirnya sosok negara, dan negara itu adalah dirinya. Poinnya bukanlah informalitas itu tidak penting, melainkan bahwa dalam relasi yang terjalin ada begitu kuat kepentingan-kepentingan informal yang diolah, sedemikian sehingga setup formal menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam rezim ini, demokratisasi disambut oleh aktor dominan untuk meneguhkan posisinya di dalam jabatan-jabatan formal negara. Institusi informal seperti adat dan agama digunakan oleh aktor dominan sebagai instrument untuk memenangkan kekuasaan politik. Di dalam rezim ini, aktor alternatif tidak memiliki kekuatan signifikan dalam memengaruhi dinamika lokal. Keberadaan aktor alternatif ini bahkan bisa

dibilang tekeh kooptasi oleh aktor dominan untuk menjaga stabilitas rezim lokal.

Kalau rezim yang sebelumnya digambarkan ingin menghadirkan dirinya di domain formal untuk menyamakan kepentingan personalnya, elite yang sentral dalam rezim ini berada dalam situasi yang berbeda. Mereka sadar, justru akan celaka manakala hanya memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, demokrasi manifes dalam consensus di kalangan elite-elite formal. Tidak ada gunanya lagi menyembunyikan pragmatism, karena struktur kesempatan yang tersedia tidak memungkinkan mereka melakukan damage control, bukan memaksimalkan perolehan. Rezim yang tumbuh dan berkembang justru di tempa oleh sederet persoalan pelik. Untuk bisa menjangkau substansi persoalan, mereka perlu buka-bukaan dan hal semacam ini hanya kondusif digelar dalam domain informal. Dalam kategori ini, perpolitikan mengandalkan kelembagaan yang sifatnya informal. Demi kesaksamaannya dalam membahas substansi persoalan yang ada, proses komunikasi yang dijalani adalah proses yang lebih substansif. Selain di Jayapura yang sudah lama dikenal sebagai lumbung konflik, tantangan sulit untuk berdemokrasi juga bisa dirasakan dalam pengalaman di Pontianak, yang masih memelihara ingatan segar tentang kekerasan massal. Selain ini, gejala semacam ini juga teramati di Gorontalo, yang secara historis selalu memosisikan diri sebagai pinggirannya (kelompok marginal) dari kelompok Minahasa dalam ikatannya sebagai wilayah kekuasaan Manado.

Agar persoalan yang dibahas dalam menembus berbagai sekat struktural yang ada, perpolitikan sangat kental dengan pewacanaan, dan

oleh karenanya bersifat deliberatif. Namun, karena poros perpolitikan pada tokoh-tokoh lokal yang begitu beragam, proses semacam musyawarah antar elite itulah yang menyelesaikan persoalan yang ada. Hal tersebut di atas tergambar secara jelas di Jayapura. Adat menjadi lokus perpolitikan disana. Ketika parah tokoh kunci yang terlibat mencari solusi terhadap masalah-masalah setempat, mereka harus/bisa masuk domain formal. Nuansa representasi yang sejatinya informal ini memungkinkan berlangsungnya proses policy-making yang kental dengan nuansa deliberatif.

Institusi-institusi informal yang mengemuka dari profiling di atas sangat bervariasi, termasuk juga marga ikatan kekerabatan maupun agama. Kalaulah para aktor kunci ini dikondisikan untuk berkontestasi atas nama demokrasi, mereka mengutamakan negosiasi untuk mencapai consensus.

Berkebalikan dengan rezim elitis formalitas di mana aktor kunci mengandalkan institusi formal, dalam rezim sosio-kulturalis yang paling masuk akal adalah memanfaatkan institusi-institusi informal. Kalau dalam tradisi Tana Toraja ada event rambu solo, di pesantren-pesantren juga ada acara haul. Pada saat itu jejaring informal menggeliat memamerkan kapasitas mobilisasi sumberdaya dimiliki. Pada saat lainnya, misalnya pilkada, energi kolektif yang dirawat melalui komunikasi berjejaring bisa ditransformasi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Aktor-aktor informal memiliki posisi sentral dalam rezim lokal sehingga mampu membuat aktor dominan patuh terhadap aturan main dari institusi informal dalam rezim ini. Relasi yang terjadi adalah saling tahu satu sama lain. Meskipun tetap

dipengaruhi oleh demokrasi elektoral, rezim sosio kulturalis mampu mencari celah untuk menyiasati rezim elektoral.

Dalam rezim ini tidak ada urgensi untuk memeragakan formalitas, karena domain formal ada dalam kendalinya. Eksistensi rezim melekat dalam institusi informal, tepatnya adat. Ambil contoh di Tana toraja. Sebagaimana yang telah diketahui, adat mencengkram perpolitikan yang berlangsung, dan dalam set-up kelembagaan yang ada, para elite lah yang lebih menikmati keuntungan-keuntungan dari pemberlakuan demokrasi elektoral. Dalam suasana seperti ini, jalannya kontestasi saat pilkada hampir tidak bisa dibedakan dengan suasana mobilitas jejaring untuk ritual rambu solo. Para tokoh yang menjadi penentu utama adalah mereka yang mendudukkan posisi-posisi strategi dalam informal. Norma-norma kultural yang notabene berwatak informal justru disepakati sebagai acuan bersama.

Setara dengan kokohnya norma adat di Tana toraja, di Sidoarjo kita menyaksikan kokohnya norma ke kyai an atau kepesantrenan. Norma-norma adat ini juga sangat kuat mendiktekan pilihan-pilihan politik masyarakat setempat. Setara dengan ajaran adat yang merasuk dalam alam bawah sadar masyarakat, komunitas santri dengan kyai dan pesantren sebagai porosnya memolakan perilaku kolektif masyarakat.

Dengan kata lain, iklim demokrasi yang merebak sebetulnya membuka ruang politisasi adat ataupun agama. Lebih dari itu, tidak ada kendala yang berarti bagi tokoh adat ataupun agama untuk memanfaatkannya. Secara singkatnya dalam situasi ini negara justru dapat diambil alih oleh adat atau agama. Rezim yang terbentuk kita juluki rezim sosio kulturalis. Hegemoni

cara berpikir kulturalis yang semuanya dalam kendali para tokoh adat, menjadikan sirnanya tantangan demokrasi di dalam rezim yang seperti ini tidak pernah mengedepan.

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur logika sesuai dengan tema penelitian yang akan ditulis. Hal ini berasal dari rumusan masalah yang telah ditentukan kemudian dikaitkan dengan pendekatan, teori, dan konsep. Berangkat dari pemahaman konsep rezim lokal yang memiliki beberapa dimensi yakni; pertama, dimensi rezim meliputi aktor dan institusi baik formal maupun informal. Kedua, institusi tersebut, yakni institusi formal dan informal terjalin relasi di antara keduanya. Ketiga, Rezim yang terbentuk karena adanya kesempatan politik dan bersifat stabil. Keempat, Rezim lokal dipengaruhi oleh struktural eksogen dari lokalitas.

Berdasarkan uraian di atas dalam dimensi rezim lokal, posisi kepala desa sebagai aktor serta pemegang kekuasaan institusi formal di pemerintah desa. Aktor formal pemegang kendali atas Institusi formal juga menjalankan relasi dengan aktor informal ataupun institusi formal dan informal lainnya. Kemudian asumsinya adalah relasi pada aktor formal serta institusi formal dan informal pada rezim politik pemerintah desa meliputi berbagai hubungan dalam pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat yang bersifat saling tergantung satu sama lain. Setelah melihat bentuk hubungan dalam rezim politik lokal kemudian karakteristik atau variasi dari rezim dapat tergambarkan. Maka dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana bentuk karakteristik rezim lokal pada Desa Assorajang, serta bagaimana bentuk

hubungan yang terjadi dalam rezim kepala desa setelah memahami hubungan atau relasi kuasa yang ada dalam rezim politik kepala desa tersebut.

2.4. Skema Pemikiran

